

**Jurnal**

**Tanggung Jawab Hukum dari Pengelola Taman Wisata Terhadap  
Keselamatan Pengunjung Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun  
1999 Tentang Perlindungan Konsumen  
( Studi di Jawa Timur Park 1 Kota Batu )**

*Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat*

*Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan*

*Dalam Ilmu Hukum*

Oleh:

**Bintang Ulya Kharisma**

NIM. 0910110017



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2013

**Tanggung Jawab Hukum dari Pengelola Taman Wisata Terhadap  
Keselamatan Pengunjung Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun  
1999 Tentang Perlindungan Konsumen  
( Studi di Jawa Timur Park 1 Kota Batu )**

Bintang Ulya Kharisma

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: [bintangkharisma25@gmail.com](mailto:bintangkharisma25@gmail.com)

**ABSTRACT**

Consumer rights violations committed by many businesses still found around the community, including violations of consumer rights while in Tourism Park which is often neglected. Tornado in the case of a vehicle breakdown Jawa Timur Park Batu is one case that led to the loss of consumers. This research was conducted by the sociological juridical primary data and secondary data. The results of the study were the perpetrators of Business, has fulfilled the responsibility of compensation to the clinical examination in East Java Park, consumption, and East Java Park admission is open 1 gate. However, there are no further legal action against such accidents because no report and the results of Surabaya Forensic Laboratory team did not find a fault. Though the East Java Park 1 Batu actually be subject to criminal sanctions in accordance with Article 62 of the UUPA. As well as the realization yet of legal responsibility businesses are also caused by several factors: Factor of officers who do not understand the consumer protection, Factor facility / facilities, and lack of oversight of government factors.

**Keywords: Responsibility Law, Consumer Protection**

**ABSTRAKSI**

Pelanggaran hak konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha masih banyak ditemukan disekitar masyarakat, termasuk pelanggaran hak konsumen selama berada di Taman Wisata yang masih seringkali terabaikan. Kasus

macetnya wahana Tornado di Jawa Timur Park 1 Kota Batu adalah kasus yang menyebabkan adanya kerugian konsumen. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis sosiologis terhadap data primer dan data sekunder. Hasil yang didapat dari penelitian adalah pelaku Usaha, telah memenuhi tanggung jawab ganti rugi kepada dengan pemeriksaan di klinik Jawa Timur Park, konsumsi, dan tiket masuk Jawa Timur Park 1 yang bersifat *open gate*. Akan tetapi, tidak terdapat tindakan hukum lebih lanjut terhadap kecelakaan tersebut karena tidak ada laporan dan hasil pemeriksaan tim Laboratorium Forensik Surabaya tidak menemukan adanya suatu kesalahan. Padahal pihak Jawa Timur Park 1 Kota Batu sebenarnya dapat dikenai dengan sanksi pidana sesuai dengan pasal 62 UUPA. Serta belum terwujudnya tanggung jawab hukum dari pelaku usaha juga disebabkan oleh beberapa faktor yaitu Faktor dari aparat yang kurang paham terhadap perlindungan konsumen, Faktor sarana / fasilitas, dan faktor lemahnya pengawasan dari pemerintah.

**Kata Kunci : Tanggung Jawab Hukum, Perlindungan Konsumen**

## **A. PENDAHULUAN**

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi dengan baik. Semakin bertambahnya pertumbuhan masyarakat kelas menengah atas, maka makin banyak pula kebutuhan yang diinginkan atau ditawarkan. Tidak hanya kebutuhan pokok seperti rumah, pakaian, pekerjaan, dan prasarana yang menunjang. Tetapi tingkat kebutuhan akan suatu hiburan atau rekreasi juga menjadi pertimbangan. Munculnya taman wisata yang sudah dimana-mana menjadikan keamanan dan kenyamanan konsumen perlu diperhatikan bagi setiap produsen selaku pemilik barang dan jasa yang ditawarkan.

Kegiatan ekonomi ini tentu tidak dapat dilepaskan dari dua peran penting, yaitu pembuat barang/jasa ( produsen ) dan pemakai barang/jasa ( konsumen ) yang saling berhubungan. Hubungan antara produsen dengan konsumen inilah yang kemudian memunculkan suatu permasalahan yang

baru yaitu hilang atau berkurangnya hak konsumen akan barang yang telah dikonsumsi. Banyaknya pelanggaran terhadap hak konsumen atas barang yang dimilikinya membuat posisi konsumen masih sangat lemah dibandingkan dengan produsen. Sehingga perlu terdapat suatu pemberdayaan konsumen agar posisi konsumen tidak selalu pada pihak yang dirugikan, yaitu dengan diaturnya perlindungan konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan suatu bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Apabila suatu perlindungan konsumen tidak dapat terpenuhi dalam suatu bisnis, maka keseimbangan hukum antara produsen dengan konsumen juga tidak dapat terjadi. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada dalam posisi yang lemah<sup>1</sup>

Upaya pemerintah untuk melindungi hak hak konsumen sebenarnya telah tercantum dalam beberapa peraturan perundang – undangan, yaitu misalnya dalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Barang dan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk. Akan tetapi pada beberapa prakteknya, UUPK masih belum dijalankan dengan baik. Contoh kasus serupa terjadi di Taman Wisata Jawa Timur Park ( Jatim Park ) , Batu pada tanggal 26 Januari 2009<sup>2</sup>. Dimana sebanyak 30 pengunjung yang sedang menaiki wahana tornado tiba – tiba berhenti dan terjebak pada ketinggian 5 – 7 meter. Kemudian mereka baru dievakuasi setelah satu jam terjebak di wahana tersebut dengan peralatan seadanya.

Adanya kasus diatas, sebaiknya pengelola taman hiburan selaku pelaku usaha harus benar benar memperhatikan tingkat keamanan dan keselamatan pengunjung selama dalam taman wisata itu sendiri karena konsumen telah melakukan kewajibannya yang berupa membayar tiket,

---

<sup>1</sup> Ahmadi Miru I, Ahmadi Miru I, *Prinsip – Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, Hlm 1

<sup>2</sup> Bambang, *Puluhan Penumpang Wahana Tornado* , 2009 (online) [www.antaranews.com](http://www.antaranews.com) diakses 05 September 2012

sehingga produsen harus menunaikan kewajibannya pula untuk menjamin keselamatan konsumen.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dari kejadian yang tertulis diatas maka terdapat 2 masalah yang ingin diketahui jawabannya, yaitu :

1. Bagaimana tanggung jawab hukum dari pihak pengelola Jawa Timur Park 1 Kota Batu bagi pengunjung apabila terjadi suatu kecelakaan yang merugikan konsumen terkait ketentuan Undang Undang nomor 8 Tahun 1999?
2. Apa faktor yang mempengaruhi belum terwujudnya tanggung jawab hukum dari pengelola taman wisata terhadap kecelakaan yang merugikan konsumen?

## **C. METODE**

Jenis penelitian hukum yang akan dilakukan oleh adalah empiris, yaitu metode penelitian yang langsung turun ke lapangan dan menggunakan data primer dan metode pendekatan yang dilakukan adalah metode pendekatan yuridis sosilogis , dimana penelitian ini mengkaji pelaksanaan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap jaminan hak - hak konsumen selama berada di taman wisata tersebut.

Penelitian ini tidak hanya bertujuan memberikan gambaran tentang fakta – fakta yang ada yang diperoleh di lapangan maupun dari studi kepustakaan. Tetapi setelah dipelajari ketentuan hukumnya dan diteliti di lapangan, diadakan analisa kasus dan hambatannya serta dampak yang ditimbulkan dengan berjalannya impleentasinya. Data yang digunakan adalah primer dan data sekunder yang didapatkan dengan cara wawancara, kuisisioner dan dokumentasi pada lokasi penelitian, yaitu di Taman Belajar dan Hiburan Jawa Timur Park 1 Kota Batu.

#### **D. PEMBAHASAN**

##### **Tanggung Jawab Hukum dari pengelola Jawa Timur Park 1 Kota Batu bagi pengunjung apabila terjadi suatu kecelakaan yang merugikan konsumen terkait ketentuan Undang Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**

Setiap pelaku usaha dan konsumen pada umumnya terikat dalam suatu perjanjian. Bentuk perjanjian antara pihak pelaku usaha Jawa Timur Park 1 dengan konsumen adalah melalui tiket. Dalam pasal 5 Undang Undang Perlindungan Konsumen ayat 2 dan ayat 3 disebutkan bahwa konsumen wajib untuk beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa serta membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Konsumen yang ingin menikmati jasa yang ada di dalam Jawa Timur Park 1 wajib membeli tiket dengan harga yang telah ditentukan oleh manajemen Jawa Timur Park. Bentuk perjanjian tersebut sering juga dikenal dengan sebutan perjanjian standar ( baku ).

Jawa Timur Park 1 sebagai perusahaan pariwisata yang menawarkan produk berupa jasa, maka tanggung jawab yang timbul adalah pada saat pengunjung selaku konsumen datang untuk menikmati jasa yang telah ditawarkan dan telah dibayar sesuai dengan yang telah ditetapkan, akan tetapi kemudian pengunjung tersebut mengalami suatu kerugian yang diakibatkan kecelakaan baik di area Jawa Timur Park 1 ataupun pada saat menaiki wahana.

Kronologi kejadian dari macetnya wahana Tornado ini adalah stabilisasi listrik yang kurang lancar sehingga voltasenya turun dan menyebabkan sistem komputerisasi tidak berfungsi. Sehingga operator wahana ini membutuhkan waktu untuk menggunakan sistem yang ada di wahana Tornado tersebut secara manual dan membutuhkan waktu. Karena dilakukan dengan manual maka evakuasi pengunjung tidak bisa dilakukan

dengan cepat. Pengunjung yang sudah berhasil dievakuasi rata – rata mengalami guncangan psikologis akibat kaget atau shock disertai dengan muntah – muntah.<sup>3</sup>

Sesuai dengan pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Jawa Timur Park 1 dalam membantu pelaksanaan ganti kerugian telah bekerja sama dengan PT. Jasa Raharja dan untuk mempermudah administrasinya diserahkan kepada anak perusahaan yaitu PT. Jasa Raharja Putera. Untuk Ganti rugi yang diberikan oleh pihak Jawa Timur Park 1 kepada pengunjung yang mengalami insiden Tornado berupa pemeriksaan di klinik Jawa Timur Park 1 untuk memeriksa apakah ada luka yang serius atau dapat menyebabkan hilangnya nyawa. Serta diberikan makan, minum, dan obat yang diperlukan bagi pengunjung yang masih shock dan diberikan tiket gratis yang sifatnya *open gate* atau bisa digunakan kapan saja / tidak ada ketentuan masa berlakunya.<sup>4</sup>

Berdasarkan pasal 19 ayat 4 yang berbunyi Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Akan tetapi, sesuai dengan hasil kuisioner yang disebarkan menunjukkan bahwa hanya 40% konsumen yang mengetahui ketika terdapat kecelakaan yang merugikan mereka, konsumen dapat mengajukan gugatan atau mengajukan laporan sehingga kasus tersebut dapat diproses secara hukum. Dan sebanyak 60% tidak mengetahui hal tersebut dan memilih langsung meminta pertanggung jawaban dari pihak pelaku usaha. Sehingga tidak terdapat tindakan atau

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Meida, selaku Manager HRD, di Jawa Timur Park 1, 17 November 2012.

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Meida di Jawa Timur Park1, 05 Januari 2013.

sanksi hukum yang diberikan karena tidak adanya laporan atau gugatan kepada pihak berwajib.

Gugatan ganti kerugian yang didasarkan atas perbuatan melanggar hukum tidak perlu didahului dengan perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen, sehingga tuntutan ganti kerugian dapat dilakukan oleh setiap pihak yang dirugikan, walaupun tidak pernah terdapat hubungan perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen.<sup>5</sup> Gugatan ganti kerugian atas perbuatan melanggar hukum harus memenuhi unsur – unsur sebagai berikut :

- a. Adanya perbuatan melanggar hukum
- b. Ada kerugian
- c. Ada hubungan kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian
- d. Ada kesalahan

Dalam kasus ini pihak Jawa Timur Park sebenarnya dapat dikenai sanksi pidana baik dari Undang Undang Perlindungan Konsumen. Karena pihak Jawa Timur Park 1 telah melanggar isi dari pasal 8 ayat 1 huruf a , d, dan e Undang Undang Perlindungan Konsumen mengenai Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.

Pasal 8 ayat 1 huruf a yang dilanggar oleh pihak Jawa Timur Park 1 sebagai pelaku usaha adalah pelaku usaha tidak memenuhi standar sebagaimana yang seharusnya telah diatur. Sedangkan dalam huruf d, pihak Jawa Timur Park 1 melanggar ketentuan karena adanya ketidaksesuaian kondisi dan jaminan atas wahana yang dioperasikan. Karena wahana yang dioperasikan seharusnya menjamin keamanan konsumen yang menggunakan. Dan untuk pasal 8 ayat 1 huruf e, pelaku usaha melanggar adanya ketentuan mengenai proses pengolahan yaitu pada saat bagaimana wahana tersebut dioperasikan.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 129



Pentingnya sanksi pidana yang seharusnya diterapkan terhadap banyaknya kasus pelanggaran hak konsumen adalah jasa yang ditawarkan dinikmati oleh masyarakat lokal dan masyarakat internasional, sehingga dengan mendorong tampilnya hukum pidana untuk turut mendukung dipatuhinya standar keamanan barang dan/atau jasa demi melindungi konsumen apabila terjadi pelanggaran terhadap standar tersebut yang dapat membawa dampak kerugian baik materiil, fisik maupun psikis konsumen yang dilindungi oleh hukum pidana.

### **Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Belum terwujudnya Tanggung Jawab Hukum dari Pengelola Taman Wisata terhadap kecelakaan yang merugikan konsumen**

Pertanggung Jawaban Hukum Pengelola taman Wisata dalam kasus macetnya wahana Tornado bukan hanya terbatas pada tanggung jawab yang berupa ganti kerugian yang diberikan kepada konsumen akan tetapi juga dapat dipertanggung jawabkan secara pidana sesuai dengan Undang Undang Perlindungan Konsumen. Sedikitnya jumlah kasus perlindungan Konsumen yang diperkarakan secara pidana menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih belum maksimal. Penegakan Hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai – nilai yang terjabarkan di dalam kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup<sup>6</sup>

Gangguan terhadap penegakan hukum dapat terjadi apabila terdapat ketidakserasian antara tritunggal, yaitu nilai, kaidah dan pola perilaku.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, Faktor – Faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011. Hlm 5

<sup>7</sup> *Ibid.* Hlm 7

Berikut beberapa faktor masalah yang dapat mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto:<sup>8</sup>

a. Faktor Hukum itu sendiri

Yang dimaksud dengan faktor hukum adalah sebatas Undang – Undang dalam arti material yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa Pusat maupun Daerah yang sah.

b. Faktor Penegak Hukum

Yang dimaksud dengan penegak hukum adalah kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum, tidak hanya mencakup *law enforcement* juga tetapi *peace maintenance*.

c. Faktor Sarana / fasilitas

Sarana atau fasilitas tersebut antara lain yaitu tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sistem yang baik.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian masyarakat. Oleh karena itu masyarakat memiliki pengaruh terhadap penegakan hukum itu sendiri.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya tidak bisa dilepaskan dengan faktor masyarakat. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai – nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

---

<sup>8</sup> *Ibid. Hlm 8*

Sehubungan dengan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, maka dapat dikaitkan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi belum terwujudnya Tanggung Jawab Hukum dari Pengelola Taman Wisata terhadap kecelakaan yang merugikan konsumen, yaitu :

### **1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat**

Masyarakat yang dimaksud dalam hal ini adalah konsumen yang menggunakan barang dan/atau jasa. Hans W. Micklitz, seorang ahli hukum konsumen dari Jerman dalam ceramah di Jakarta tanggal 26 – 30 Oktober 1998 membedakan 2 tipe konsumen yang mendapatkan perlindungan, yaitu<sup>9</sup> : Tipe Konsumen yang Terinformasi dan Tipe Konsumen yang tidak Terinformasi. Tipe Konsumen yang tidak terinformasi inilah yang perlu diperhatikan secara khusus. Tipe konsumen yang tidak terinformasi merupakan tipe konsumen yang tidak mengetahui tentang adanya aturan terhadap hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen, tidak mengerti bagaimana cara menggunakan upaya hukum apabila terjadi suatu kecelakaan yang dapat merugikan dirinya.

### **2. Faktor dari Tingkat Pemahaman Aparat Penegak Hukum terhadap Perlindungan Hukum bagi Konsumen yang Masih Rendah**

Kasus macetnya wahana Tornado di Jawa Timur Park 1 sempat diperiksa oleh Tim Laboratorium Forensik Surabaya. Akan tetapi, karena pihak Laboratorium Forensik tidak mengerti mengenai apa yang diperiksa terhadap wahana tersebut maka pihak Laboratorium Forensik Surabaya dengan pihak Jawa Timur Park 1

---

<sup>9</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm 34 -35

hanya melakukan olah foto disekitar Tempat Kejadian Perkara dan mengisi berkas BAP yang kemudian dilaporkan kepada pusat bahwa tim Laboratorium Forensik tidak menemukan suatu kesalahan dan pada akhirnya tidak masuk dalam ranah hukum.<sup>10</sup>

### **3. Faktor Sarana / Fasilitas**

Faktor Sarana / fasilitas meliputi tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan dan lain - lain.<sup>11</sup>

### **4. Lemahnya Pengawasan dari Pemerintah**

Lemahnya pengawasan dari pemerintah kota Batu khususnya Dinas Perdagangan dan Industri serta Dinas Ketenagakerjaan juga dapat mempengaruhi belum terpenuhinya tanggung jawab hukum atas suatu perlindungan konsumen. Kurangnya pemantauan dari pemerintah mengenai kepatuhan dan ketidakpatuhan pelaku usaha juga dirasa kurang sehingga tidak banyak diketahui penerapan norma hukum pidana dalam UUPK baik terhadap individu pelaku usaha maupun korporasi pelaku usaha.<sup>12</sup>

## **E. PENUTUP**

### **a. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, pengolahan dan analisis data maka dapat ditarik kesimpulan dari pembahasan rumusan masalah yang ada. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut.

1. Tanggung Jawab Hukum dari pengelola Jawa Timur Park 1 Kota Batu bagi pengunjung merupakan hasil dari suatu hubungan hukum ketika pengunjung mulai membeli tiket masuk area Jawa Timur Park 1. Apabila kemudian terjadi suatu kecelakaan yang mengakibatkan rugi

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Bambang, di Jawa Timur Park1, 5 Januari 2013

<sup>11</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *op.cit*, hlm 115

<sup>12</sup> Yusuf Shofie, *op.cit*, hlm 15

bagi pengunjung, pihak Jawa Timur Park 1 akan bertanggung jawab sepenuhnya. Terkait dengan kecelakaan atas macetnya wahana Tornado maka sesuai dengan pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Ganti rugi yang diberikan kepada konsumen adalah adanya pemeriksaan di klinik Jawa Timur Park 1 Kota Batu untuk mengetahui apakah ada luka serius atau tidak, obat – obatan, konsumsi, dan tiket masuk secara gratis ke Jawa Timur Park 1 Kota Batu yang bersifat *Opengate*. Akan tetapi, tidak ada tindakan hukum yang diberikan kepada pihak Jawa Timur Park 1 atas kejadian tersebut. Padahal semestinya pihak Jawa Timur Park 1 dapat dikenai sanksi pidana menurut UUPK yang terdapat di pasal 62 ayat 1

2. Faktor yang mempengaruhi belum terwujudnya tanggung jawab hukum dari pengelola taman wisata terhadap kecelakaan yang merugikan konsumen yaitu berasal dari :
  - a. Faktor Kurangnya Kesadaran Masyarakat, yaitu masyarakat masih belum mengetahui hak dan kewajibannya yang telah dilindungi menurut Undang Undang Perlindungan Konsumen.
  - b. Faktor kurangnya tingkat pemahaman aparat penegak hukum terhadap perlindungan hukum bagi konsumen
  - c. Faktor sarana atau fasilitas, yaitu terkait dengan tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi, peralatan, dan lain – lain.
  - d. Faktor Lemahnya pengawasan dari pemerintah, yakni terkait dengan pengawasan dari Dinas Perdagangan dan Industri, serta Dinas Ketenagakerjaan setempat yang dirasa kurang.

## **b. Saran**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka saran yang dapat diberikan adalah :

- a. Tanggung Jawab Hukum pihak Jawa Timur Park 1 terhadap ganti rugi konsumen hendaknya lebih diperhatikan dengan memberikan jaminan apabila di kemudian hari masih terdapat gangguan kesehatan yang dialami oleh konsumen, Serta diberikannya tindakan hukum berupa sanksi pidana kepada pihak Jawa Timur Park 1 agar memberikan efek jera dan adanya perlindungan hukum yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Undang Undang Perlindungan Konsumen serta mencegah terjadinya insiden serupa.
- b. Faktor penyebab belum terwujudnya tanggung jawab hukum dari pengelola taman wisata terhadap kecelakaan yang merugikan konsumen ini dapat diperbaiki dengan :
  - a. Faktor Kurangnya Kesadaran Masyarakat yaitu dengan memberikan informasi informasi terkait dengan hak dan kewajiban konsumen.
  - b. Faktor kurangnya tingkat pemahaman aparat penegak hukum terhadap perlindungan hukum bagi konsumen yaitu dengan memberikan penyuluhan hukum mengenai Undang Undang Perlindungan Hukum.
  - c. Faktor sarana atau fasilitas, yaitu dengan selalu meng-*upgrade* baik kualitas dari seseorang, mesin, organisasi, dan hal hal yang terkait agar lebih baik dan efisien.
  - d. Faktor lemahnya Pengawasan dari Pemerintah, yaitu dengan tetap mengoptimalkan kualitas kerja dan wahana agar selalu dalam kondisi yang baik, sehingga tidak perlu menunggu adanya inspeksi dari Dinas terkait.

## DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi Miru, 2011, *Prinsip – Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Ahamdi Miru & Sutarman Yodo, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajagrafindo Persada

Celina Tri Siwi Kristayanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika

Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta

### **Peraturan Perundang - Undangan**

Kitab Undang Undang Hukum Pidana ( KUHP )

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

### **Data Internet**

Bambang,2009, *Puluhan Penumpang Wahana Tornado Terjebak* (online)  
[www.antaranews.com](http://www.antaranews.com)

Abdullah Mubarak,2011, *Inilah Detik-detik Insiden Tornado Dufan* ( online )  
[www.inilah.com](http://www.inilah.com)